

## ABSTRAK

Pada dasarnya masyarakat merupakan sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Masyarakat dalam menjalani kehidupan tentunya ingin merasakan keamanan serta kenyamanan, rasa aman dapat diciptakan dengan cara bersama-sama. Namun tidak sedikit masyarakat yang tidak peduli terhadap keamanan lingkungannya, sehingga keamanan dan ketertiban di lingkungan tidak terjaga sesuai rencana karena adanya hambatan. Hambatan yang dimaksud adalah masyarakat yang tidak berperan dalam memelihara atau bahkan malah merusak fasilitas umum yang telah diberikan. Untuk menciptakan keamanan, kenyamanan dan ketertiban bagi masyarakat perlu adanya peran dari penegak hukum sebagai pelaksana undang-undang, dalam hal ini adalah kepolisian. Menurut Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Indonesia (selanjutnya disebut UU Kepolisian), Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis kualitatif dan spesifikasinya dilakukan secara deskriptif analitis, yang sumber datanya diperoleh dari peraturan perundang-undangan dengan teori-teori hukum serta dari hasil wawancara yang menjadi objek penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif yang menghasilkan suatu kesimpulan. Penulis melakukan penelitian di Polres Cimahi yang membawahi dua wilayah pemerintahan yaitu Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat bahkan ditambah dari satu Kecamatan di wilayah Kabupaten Bandung yaitu Kecamatan Marga Asih yang idealnya satu Pemerintahan satu Polres.

Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam upaya menanggulangi tindak Pidana dilakukan secara preemtif, preventif, represif. Dalam praktik penegakan hukum, pihak Kepolisian mengedepankan upaya preventif atau pencegahan dibandingkan upaya represif atau penindakan yang dianggap akan membahayakan keselamatan masyarakat, pelaku tindak Pidana maupun anggota Kepolisian sendiri. Dalam menjalankan tugasnya Polisi menghadapi berbagai hambatan, baik yang bersifat internal ataupun eksternal.

## **ABSTRACT**

Basically society is a number of people in the broadest sense and bound by a culture that they think is the same. In life people certainly want to experience security and comfort, a sense of security can be created in a way together. But not a few people who do not care about the security of their environment are not maintained according to plan because of obstacles. The intended obstacle is that the community does not maintain or even neglect the security of the surrounding environment. To create security, comfort and order for the community, it is necessary to have the role of law enforcers as the executor of the law in this case the police. According to article 5 paragraph 1 of police law number 2 of 2002. The republic of Indonesian police force is a state instrument that plays a role in maintaining public order and security, upholding the law, as well as providing protection, protection and services to the community in the context of maintaining domestic security.

The study was conducted with a qualitative juridical approach and the specifications were carried out descriptively analytically, the data sources are obtained from laws and regulations with legal theories as well as from the results of interviews that are the object research. Data collection techniques using the study of documents and data obtained will be analyzed qualitatively which result in a conclusion. The author conducted research in the Cimahi police station which oversees two government areas namely Cimahi city and West Bandung regency and even added one sub district of Marga Asih, ideally one government one police station.

The role of the police of the republic of Indonesia in efforts to tackle criminal offenses is carried out preeventive, preventively and repressively. In law enforcement practices, the police put forward preventive or preventive measures rather than repressive or enforcement measures which is considered to endanger the safety of the community, the perpetrators of crime and members of the police themselves. In carrying out their duties the police face various obstacles, both internal and external.